

**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jeneponto Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
22. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 871/IV/2017 Tanggal 11 April 2017 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 250);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah **Rp. 1.192.235.004.415,-** dengan rincian sebagai berikut :

1 PENDAPATAN

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	113.182.239.184,-
b.	Dana Perimbangan	Rp.	887.110.689.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	120.402.044.600,-

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.120.694.972.784,-

2. BELANJA

a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Belanja pegawai	Rp.	455.895.230.722,-
2)	Belanja bunga	Rp.	0,-
3)	Belanja subsidi	Rp.	0,-
4)	Belanja hibah	Rp.	0,-
5)	Belanja bantuan sosial	Rp.	15.089.830.500,-
6)	Belanja bagi hasil	Rp.	300.000.000,-
7)	Belanja bantuan keuangan	Rp.	0,-
8)	Belanja tidak terduga	Rp.	120.251.175.079,-
		Rp.	3.231.304.985,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 594.767.541.286,-

- b. Belanja Langsung
- 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang dan Jasa
 - 3) Belanja Modal

	Rp.	8.676.090.720,-
	Rp.	344.123.343.959,-
	Rp.	244.668.028.450,-
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	597.467.463.129,-

Jumlah Belanja

Rp. 1.192.235.004.415,-

Surplus/(Defisit)

Rp. (71.540.031.631,-)

3. PEMBIAYAAN

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

	Rp.	71.540.031.631,-
	Rp.	0,-
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	71.540.031.631,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

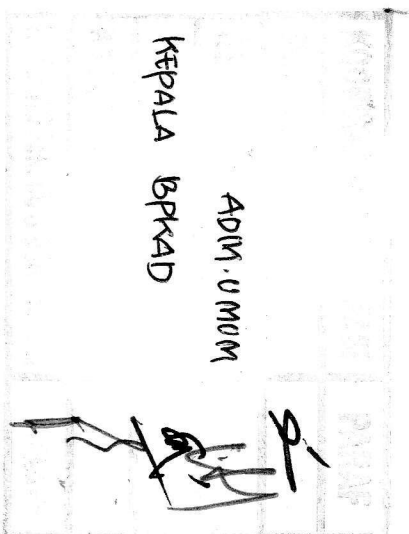
Diundangkan di : Jeneponto
Pada tanggal : **13 APRIL 2017**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**

H. MUTI IMAD SARIF, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 11



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : **13 APRIL 2017**

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

Hal : 1

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1				2	3
4				PENDAPATAN DAERAH	1.120.694.972.784,00
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.182.239.184,00
4	1	1		PAJAK DAERAH	10.155.000.000,00
4	1	1	01	Pajak Hotel	40.000.000,00
4	1	1	01 05	Hotel Bintang Dua	18.400.000,00
4	1	1	01 06	Hotel Bintang Satu	8.400.000,00
4	1	1	01 13	Wisma Pariwisata	13.200.000,00
4	1	1	02	Pajak Restoran	65.000.000,00
4	1	1	02 01	Restoran	65.000.000,00
4	1	1	04	Pajak Reklame	150.000.000,00
4	1	1	04 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	150.000.000,00
4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	5.500.000.000,00
4	1	1	05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.500.000.000,00
4	1	1	11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
4	1	1	11 06	Batu Gunung/Kali	160.000.000,00
4	1	1	11 07	Pasir Urug/Timbunan	10.000.000,00
4	1	1	11 08	Timbunan Tanah	80.000.000,00
4	1	1	11 09	Batu Bata	50.000.000,00
4	1	1	11 10	Pasir Pasangan	120.000.000,00
4	1	1	11 11	Pasir Batu (Sirtu)	30.000.000,00
4	1	1	11 12	Batu Pecah	50.000.000,00
4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.700.000.000,00
4	1	1	12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.700.000.000,00
4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00
4	1	1	13 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	200.000.000,00
4	1	2		RETRIBUSI DAERAH	76.615.781.113,00
4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	73.980.781.113,00
4	1	2	01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	72.930.781.113,00
4	1	2	01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000,00
4	1	2	01 05	Retribusi Pelayan Parkir di tepi Jalan Umum	90.000.000,00
4	1	2	01 06	Retribusi Pelayan Pasar	800.000.000,00
4	1	2	01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	35.000.000,00
4	1	2	01 13	RetribusiPengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00
4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	1.630.000.000,00
4	1	2	02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.210.000.000,00
4	1	2	02 04	Retribusi Terminal	140.000.000,00
4	1	2	02 05	Retribusi Tempat Kursus Parkir	70.000.000,00
4	1	2	02 09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000,00
4	1	2	02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	30.000.000,00
4	1	2	02 13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	70.000.000,00
4	1	2	02 19	Retribusi Jasa Usaha Ternak	100.000.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
4	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00
4	1	2	03	04	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00
4	1	2	03	08	Retribusi Situ / HO	500.000.000,00
4	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DARAH YANG DIPISAHKAN	5.442.783.121,00
4	1	3	01		Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMID	5.442.783.121,00
4	1	3	01	02	PT. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto	5.442.783.121,00
4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	20.968.674.950,00
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00
4	1	4	01	19	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	200.000.000,00
4	1	4	02		Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00
4	1	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00
4	1	4	03		Pendapatan Bunga deposito	1.000.000.000,00
4	1	4	03	01	Rekening Deposito Pada Bank	1.000.000.000,00
4	1	4	04		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.000.000.000,00
4	1	4	04	01	Kerugian Uang Daerah	2.000.000.000,00
4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00
4	1	4	10	03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00
4	1	4	14		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000,00
4	1	4	14	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
4	1	4	15		Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.518.674.950,00
4	1	4	15	05	Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas	14.518.674.950,00
4	1	4	18		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	100.000.000,00
4	1	4	18	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	100.000.000,00
4	2				DANA PERIMBANGAN	887.110.689.000,00
4	2	1			DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	20.974.368.000,00
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak	15.400.907.000,00
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.594.836.000,00
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	7.806.071.000,00
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.573.461.000,00
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000,00
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.133.680.000,00
4	2	1	02	11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti)	2.703.067.000,00
4	2	1	02	12	Bagi hasil Cukai hasil Tembakau	232.030.000,00
4	2	1	02	13	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	11.560.000,00
4	2	2			DANA ALOKASI UMUM	623.627.155.000,00
4	2	2	01		Dana Alokasi Umum	623.627.155.000,00
4	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	623.627.155.000,00
4	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	242.509.166.000,00
4	2	3	01		Dana Alokasi Khusus Non Fisik	66.123.166.000,00
4	2	3	01	01	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.984.600.000,00
4	2	3	01	02	DAK Non Fisik- Tunjangan Profesi Guru PNSD	45.463.799.000,00
4	2	3	01	03	DAK Non Fisik- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.578.000.000,00
4	2	3	01	04	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Kesehatan	11.039.802.000,00
4	2	3	01	05	DAK Non Fisik- Akreditasi Puskesmas	774.330.000,00
4	2	3	01	06	DAK Non Fisik- Jaminan Persalinan	1.601.039.000,00
4	2	3	01	07	DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	527.100.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1				2	3
4	2	3	02	Dana Alokasi Khusus Fisik	176.386.000.000,00
4	2	3	02 01	DAK Fisik Reguler- Bidang Pendidikan SD	7.316.000.000,00
4	2	3	02 02	DAK Fisik Reguler- Bidang Pendidikan SMP	3.935.000.000,00
4	2	3	02 03	DAK Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	33.000.000.000,00
4	2	3	02 04	DAK Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Sarana Pelayanan Rujukan	25.000.000.000,00
4	2	3	02 05	DAK Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	3.381.000.000,00
4	2	3	02 06	DAK Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Keluarga Berencana	1.294.000.000,00
4	2	3	02 07	DAK Fisik Reguler- Bidang Pertanian	16.180.000.000,00
4	2	3	02 08	DAK Fisik Reguler- Bidang Kelautan dan Perikanan	2.022.000.000,00
4	2	3	02 09	DAK Fisik Reguler- Bidang Pariwisata Penataan Kawasan Pariwisata	1.500.000.000,00
4	2	3	02 10	DAK Fisik Penugasan- Bidang Air Minum	5.916.000.000,00
4	2	3	02 11	DAK Fisik Penugasan- Bidang Sanitasi	4.340.000.000,00
4	2	3	02 2	DAK Fisik Penugasan- Bidang Jalan Pendukung Konektivitas	27.416.000.000,00
4	2	3	02 3	DAK Fisik Penugasan- Bidang Pasar	3.898.000.000,00
4	2	3	02 14	DAK Fisik Penugasan- Bidang Irigasi Prioritas Daerah	28.500.000.000,00
4	2	3	02 15	DAK Fisik Afirmasi- Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.821.000.000,00
4	2	3	02 16	DAK Fisik Afirmasi Bidang Transportasi	8.867.000.000,00
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	120.402.044.600,00
4	3	1		PENDAPATAN HIBAH	2.362.305.000,00
4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	2.362.305.000,00
4	3	1	03 01	Badan/lembaga/organisasi swasta	2.362.305.000,00
4	3	3		DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	41.370.000.000,00
4	3	3	01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	41.370.000.000,00
4	3	3	01 01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.100.000.000,00
4	3	3	01 03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.200.000.000,00
4	3	3	01 05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.000.000.000,00
4	3	3	01 07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	70.000.000,00
4	3	3	01 08	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.000.000.000,00
4	3	4		DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	70.517.527.000,00
4	3	4	01	Dana Penyesuaian	70.517.527.000,00
4	3	4	01 01	Dana Penyesuaian	70.517.527.000,00
4	3	5		BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	6.152.212.600,00
4	3	5	01	Bantuan keuangan dari provinsi	6.152.212.600,00
4	3	5	01 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	6.152.212.600,00
5				BELANJA DAERAH	1.192.235.004.415,00
5	1			BELANJA TIDAK LANGSUNG	594.767.541.286,00
5	1	1		BELANJA PEGAWAI	455.895.230.722,00
5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan	445.184.596.722,00
5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	275.539.711.563,00
5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga	22.337.414.301,00
5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan	9.401.341.369,00
5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional	16.711.308.876,00
5	1	1	01 05	Tunjangan Umum	4.285.399.380,00
5	1	1	01 06	Tunjangan Beras	14.139.479.197,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	3.867.073,00
5	1	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.661.774.282,00
5	1	1	01	10	Uang Paket	82.855.500,00
5	1	1	01	11	Tunjangan Panitia Musyawarah	31.074.225,00
5	1	1	01	12	Tunjangan Komisi	55.814.850,00
5	1	1	01	13	Tunjangan Panitia Anggaran	29.886.675,00
5	1	1	01	14	Tunjangan Badan Kehormatan	10.094.175,00
5	1	1	01	15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	17.219.475,00
5	1	1	01	16	Tunjangan Perumahan	2.359.488.000,00
5	1	1	01	25	Belanja Profesi	84.870.460.404,00
5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	7.942.234.000,00
5	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.615.600.000,00
5	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.303.564.000,00
5	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	660.000.000,00
5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.363.070.000,00
5	1	1	03		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.768.400.000,00
5	1	1	03	01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	302.400.000,00
5	1	1	03	02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	450.000.000,00
5	1	1	03	03	Belanja Penunjang komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.016.000.000,00
5	1	4			BELANJA HIBAH	15.089.830.500,00
5	1	4	05		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	12.400.000.000,00
5	1	4	05	01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	2.475.000.000,00
5	1	4	05	02	Organisasi Keagamaan	1.500.000.000,00
5	1	4	05	03	Organisasi Profesi	425.000.000,00
5	1	4	05	04	Sekretariat KPU	7.000.000.000,00
5	1	4	05	06	Panwaslu	1.000.000.000,00
5	1	4	06		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan	2.689.830.500,00
5	1	4	06	01	Kelompok/anggota masyarakat	2.689.830.500,00
5	1	5			BELANJA BANTUAN SOSIAL	300.000.000,00
5	1	5	01		Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
5	1	5	01	01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00
5	1	7			BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	120.251.175.079,00
5	1	7	03		Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	118.395.711.081,00
5	1	7	03	01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	118.395.711.081,00
5	1	7	04		Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	800.000.000,00
5	1	7	04	04	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kelurahan	800.000.000,00
5	1	7	05		Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.055.463.998,00
5	1	7	05	01	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	1.055.463.998,00
5	1	8			BELANJA TIDAK TERDUGA	3.231.304.985,00
5	1	8	01		Belanja Tidak Terduga	3.231.304.985,00
5	1	8	01	01	Belanja Tidak Terduga	3.231.304.985,00
5	2				BELANJA LANGSUNG	597.467.463.129,00
5	2	1			BELANJA PEGAWAI	8.682.440.720,00
5	2	1	01		Belanja Pegawai PNS	8.489.340.720,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	91.170.000,00
5	2	1	01	03	Honorarium Tim Penerima Dan Pemeriksa	108.180.000,00
5	2	1	01	04	Insentif Dan Upah Pungut	522.547.720,00
5	2	1	01	07	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.100.000,00
5	2	1	01	10	Honorarium Tim Pendata/Pemantau	67.800.000,00
5	2	1	01	12	Honor Tim Penyusun	1.015.950.000,00
5	2	1	01	13	Honor Tim Pelatihan	2.500.000,00
5	2	1	01	14	Honor Tim Pengawasan	31.200.000,00
5	2	1	01	15	Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan	346.740.000,00
5	2	1	01	19	Honorarium Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	4.800.000,00
5	2	1	02		Honorarium Non PNS	152.100.000,00
5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	87.350.000,00
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap	1.400.000,00
5	2	1	02	04	Honorarium tim pembinaan dan pengawasan	34.200.000,00
5	2	1	02	05	Honorarium tim monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.650.000,00
5	2	1	02	07	Honorarium pekerja dan penjaga stand pameran	23.500.000,00
5	2	1	06		Belanja Honorarium Non Pegawai	41.000.000,00
5	2	1	06	01	Uang saku peserta pelatihan	41.000.000,00
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	344.116.993.959,00
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis	9.698.668.510,00
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	5.169.308.930,00
5	2	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender	279.371.000,00
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	499.539.180,00
5	2	2	01	04	Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	8.700.000,00
5	2	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	406.457.300,00
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.193.402.100,00
5	2	2	01	09	Belanja Peralatan rumah Tangga	19.140.000,00
5	2	2	01	11	Belanja Buku Lainnya	372.750.000,00
5	2	2	01	12	Belanja Pengisian Tabung Oksigen	1.750.000.000,00
5	2	2	02		Belanja Bahan / Material	23.645.448.899,00
5	2	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan	1.298.280.240,00
5	2	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman	283.830.000,00
5	2	2	02	03	Belanja bibit ternak	220.500.000,00
5	2	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan	469.016.238,00
5	2	2	02	05	Belanja bahan kimia	1.890.469.095,00
5	2	2	02	06	Belanja bahan material lainnya	8.700.380.619,00
5	2	2	02	07	Belanja bahan obat-obatan Generik	4.571.715.622,00
5	2	2	02	08	Belanja bahan obat-obatan Paten	1.042.415.850,00
5	2	2	02	09	Belanja perlengkapan press ban	78.050.000,00
5	2	2	02	10	Belanja Sembakao & alat campuran lainnya	51.500.000,00
5	2	2	02	13	Belanja bahan dan peralatan	3.957.910.235,00
5	2	2	02	14	Belanja Pakaian	786.570.000,00
5	2	2	02	15	Belanja Hadiah	287.900.000,00
5	2	2	02	22	Belanja bahan/alat perlengkapan lomba	6.911.000,00
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor	120.211.569.224,00
5	2	2	03	01	Belanja telepon	460.447.210,00
5	2	2	03	02	Belanja air	200.000.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1				2	3
5	2	2	03	05 Belanja surat kabar / majalah	1.411.678.000,00
5	2	2	03	06 Belanja kawat/taksimili/internet	405.400.040,00
5	2	2	03	12 Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan	302.800.000,00
5	2	2	03	13 Belanja Jasa Konsultasi	322.200.000,00
5	2	2	03	14 Belanja Siaran Televisi	25.500.000,00
5	2	2	03	15 Belanja Upah Jasa	47.382.508.432,00
5	2	2	03	17 Belanja jasa koordinasi	130.000.000,00
5	2	2	03	18 Belanja jasa kebersihan Kantor	1.568.633.000,00
5	2	2	03	19 Belanja Pelayanan Kesehatan Gratis	51.132.781.113,00
5	2	2	03	20 Belanja jasa penyusunan / perencanaan	3.696.694.000,00
5	2	2	03	21 Belanja Jasa/Upah Kerja	214.500.000,00
5	2	2	03	22 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	4.700.000,00
5	2	2	03	23 Belanja Penambahan Daya Listrik	74.000.000,00
5	2	2	03	25 Belanja jasa pemasangan instalasi telepon	3.050.000,00
5	2	2	03	27 Belanja jasa cleaning service	56.400.000,00
5	2	2	03	30 Belanja jasa transportasi dan akomodasi	16.830.000,00
5	2	2	03	31 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan Pemerintah	64.950.000,00
5	2	2	03	35 Belanja Insentif	133.800.000,00
5	2	2	04	Belanja Premi Asuransi	31.517.587.550,00
5	2	2	04	01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan	31.190.887.550,00
5	2	2	04	02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	326.700.000,00
5	2	2	05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.282.545.800,00
5	2	2	05	01 Belanja Jasa Service	568.030.000,00
5	2	2	05	02 Belanja Penggantian Suku Cadang	1.178.415.000,00
5	2	2	05	03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.892.456.800,00
5	2	2	05	05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	261.394.000,00
5	2	2	05	07 Belanja perawatan / pemeliharaan mobil jabatan	382.250.000,00
5	2	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.555.766.400,00
5	2	2	06	01 Belanja Cetak	3.903.816.200,00
5	2	2	06	02 Belanja Penggandaan	2.522.305.200,00
5	2	2	06	03 Belanja Atribut	81.395.000,00
5	2	2	06	04 Belanja Dekorasi Panggung	16.700.000,00
5	2	2	06	05 Belanja Pembuatan Baliho	31.550.000,00
5	2	2	07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	1.234.220.000,00
5	2	2	07	02 Belanja sewa gedung / kantor / tempat	1.141.720.000,00
5	2	2	07	03 Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	77.500.000,00
5	2	2	07	04 Belanja sewa tempat parkir / uang tambat / hanggar sarana mobilitas	15.000.000,00
5	2	2	08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.944.505.000,00
5	2	2	08	01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	771.350.000,00
5	2	2	08	03 Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara	49.000.000,00
5	2	2	08	05 Transportasi dan Akomodasi	1.124.155.000,00
5	2	2	10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.239.459.500,00
5	2	2	10	01 Belanja sewa meja kursi	146.262.500,00
5	2	2	10	02 Belanja sewa komputer dan printer	16.800.000,00
5	2	2	10	03 Belanja sewa proyektor	6.000.000,00
5	2	2	10	04 Belanja generator	4.500.000,00
5	2	2	10	05 Belanja sewa tenda	1.002.212.500,00

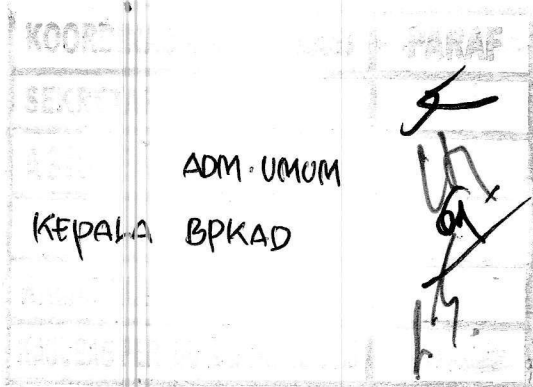
KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
5	2	3	09	11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	192.642.000,00
5	2	3	09	12	Belanja modal peralatan pengolahan sampah	1.516.902.993,00
5	2	3	09	13	Belanja modal handsprayer	6.900.000,00
5	2	3	10		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	182.824.500,00
5	2	3	10	05	Belanja modal pengadaan mesin cetak	41.200.000,00
5	2	3	10	23	Belanja Modal Pengadaan Fan Mixer	139.524.500,00
5	2	3	10	24	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	2.100.000,00
5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.281.064.049,00
5	2	3	11	02	Belanja modal pengadaan almari	12.372.500,00
5	2	3	11	04	Belanja modal pengadaan filling kabinet	4.500.000,00
5	2	3	11	05	Belanja modal pengadaan white board	3.500.000,00
5	2	3	11	07	Belanja Modal Air Conditioner	601.879.000,00
5	2	3	11	08	Belanja Horden	31.880.000,00
5	2	3	11	09	Belanja Modal Televisi	86.610.000,00
5	2	3	11	11	Belanja Modal Pengadaan mesin	4.400.000,00
5	2	3	11	12	Belanja modal perlengkapan kantor	2.401.481.549,00
5	2	3	11	13	Belanja Modal Alat Olahraga	50.000.000,00
5	2	3	11	16	Belanja Modal Pengadaan Bel Kantor	200.000,00
5	2	3	11	23	Belanja modal pengadaan papan nama kantor	46.650.000,00
5	2	3	11	27	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	37.591.000,00
5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.009.433.978,00
5	2	3	12	01	Belanja modal pengadaan komputer mainframe/server	558.656.000,00
5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	997.444.000,00
5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer notebook	564.310.500,00
5	2	3	12	04	Belanja modal pengadaan printer	248.933.500,00
5	2	3	12	05	Belanja modal pengadaan scanner	7.700.000,00
5	2	3	12	08	Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer	61.409.978,00
5	2	3	12	09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flask disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	3.950.000,00
5	2	3	12	10	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer	206.750.000,00
5	2	3	12	11	Belanja Modal Wireless	28.600.000,00
5	2	3	12	12	Belanja Modal Pengadaan Software	331.680.000,00
5	2	3	13		Belanja Modal Pengadaan Meubelair	3.381.252.951,00
5	2	3	13	01	Belanja modal pengadaan meja kerja	563.063.951,00
5	2	3	13	02	Belanja modal pengadaan meja rapat	96.420.000,00
5	2	3	13	04	Belanja modal pengadaan kursi kerja	457.868.500,00
5	2	3	13	05	Belanja modal pengadaan kursi rapat	465.725.000,00
5	2	3	13	07	Belanja modal pengadaan tempat tidur	26.000.000,00
5	2	3	13	08	Belanja modal pengadaan sofa	236.444.500,00
5	2	3	13	0	Belanja Modal Pengadaan Lemari	324.150.000,00
5	2	3	13	1	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	10.000.000,00
5	2	3	13	12	Belanja Modal Pengadaan Dinding Sekat Ruangan	459.205.000,00
5	2	3	13	13	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi	742.376.000,00
5	2	3	14		Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	62.857.500,00
5	2	3	14	01	Belanja modal pengadaan tabung gas	795.000,00
5	2	3	14	02	Belanja modal pengadaan kompor gas	695.000,00
5	2	3	14	04	Belanja modal pengadaan dispenser	6.750.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
5	2	2	20	13	Belanja Pemeliharaan Kadaruratan Bencana	2.000.000.000,00
5	2	2	20	14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	100.000.000,00
5	2	2	20	15	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan	167.250.000,00
5	2	2	20	16	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel	2.000.000,00
5	2	2	20	17	Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor	88.420.000,00
5	2	2	20	18	Belanja Pemeliharaan alat-alat rumah tangga	47.900.000,00
5	2	2	20	19	Belanja Pemeliharaan alat-alat kedokteran	10.000.000,00
5	2	2	20	20	Belanja Pemeliharaan tanaman	127.508.852,00
5	2	2	20	21	Belanja Pemeliharaan Instalasi listrik	200.499.200,00
5	2	2	20	22	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	190.000.000,00
5	2	2	20	23	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	210.345.000,00
5	2	2	21		Belanja Jasa Konsultansi	386.400.000,00
5	2	2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	232.000.000,00
5	2	2	21	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	154.400.000,00
5	2	2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.938.345.827,00
5	2	2	23	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.938.345.827,00
5	2	2	25		Belanja Koordinasi Pemerintahan	10.150.000,00
5	2	2	25	01	Belanja Koordinasi Pemerintahan	10.150.000,00
5	2	2	26		Biaya Penyusunan laporan	501.985.000,00
5	2	2	26	01	Biaya penyusunan laporan	501.985.000,00
5	2	2	27		Biaya Kegiatan Pemdampingan	196.400.000,00
5	2	2	27	01	Biaya Kegiatan Pemdampingan	196.400.000,00
5	2	2	28		Belanja Rumah Tangga	331.700.000,00
5	2	2	28	01	Belanja Rumah Tangga Bupati	121.700.000,00
5	2	2	28	02	Belanja Rumah Tangga Wakil Bupati	110.000.000,00
5	2	2	28	03	Belanja Rumah Tangga Sekda	100.000.000,00
5	2	2	29		Belanja Operasional	18.682.799.673,00
5	2	2	29	01	Belanja Operasional	18.682.799.673,00
5	2	2	32		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	876.128.560,00
5	2	2	32	01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	876.128.560,00
5	2	3			BELANJA MODAL	244.668.028.450,00
5	2	3	01		Belanja Modal Pengadaan Tanah	4.356.130.000,00
5	2	3	01	32	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan Umum	4.356.130.000,00
5	2	3	03		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7.891.004.385,00
5	2	3	03	02	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	428.800.000,00
5	2	3	03	03	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	703.140.000,00
5	2	3	03	05	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	510.000.000,00
5	2	3	03	09	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	2.404.242.610,00
5	2	3	03	10	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	3.005.450.000,00
5	2	3	03	12	Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	839.371.775,00
5	2	3	05		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	1.587.100.000,00
5	2	3	05	01	Belanja modal pengadaan kapal motor	1.587.100.000,00
5	2	3	08		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.081.150.000,00
5	2	3	08	06	Belanja modal pengadaan mesin listrik	1.081.150.000,00
5	2	3	09		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	1.835.144.993,00
5	2	3	09	03	Belanja modal pengadaan mesin bajak	82.350.000,00
5	2	3	09	05	Belanja Modal Pengadaan Pompa	13.000.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
5	2	2	10	07	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	908.920.000,00
5	2	2	10	09	Belanja sewa Genzet	564.500,00
5	2	2	10	10	Belanja sewa lighting	500.000,00
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	22.669.381.100,00
5	2	2	11	01	Belanja makan dan minuman harian pegawai	7.876.650.250,00
5	2	2	11	02	Belanja makan dan minuman rapat	5.504.901.850,00
5	2	2	11	03	Belanja makan dan minuman tamu	5.601.689.500,00
5	2	2	11	05	Belanja makan dan minum pasien	2.116.375.000,00
5	2	2	11	06	Belanja Makan Minum Pendata	64.740.000,00
5	2	2	11	07	Belanja Makan Minum Pelatihan	721.754.000,00
5	2	2	11	08	Belanja Makan Minum Sosialisasi	184.630.000,00
5	2	2	11	09	Belanja Makan Minum Lembur	16.470.000,00
5	2	2	11	10	Belanja Makan Minum Kegiatan	95.223.000,00
5	2	2	11	11	Belanja Makan Minum Posko Hari Raya	460.000.000,00
5	2	2	11	12	Belanja Makan Minum Seminar	26.947.500,00
5	2	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.623.094.640,00
5	2	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	163.870.000,00
5	2	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.082.810.000,00
5	2	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	54.900.000,00
5	2	2	12	07	Belanja Lambang Daerah	178.000.000,00
5	2	2	12	08	Belanja pakaian PASKIBRAKA	143.514.640,00
5	2	2	13		Belanja Pakaian Kerja	477.667.000,00
5	2	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan	298.755.000,00
5	2	2	13	02	Belanja pakaian olah raga	178.912.000,00
5	2	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	683.679.985,00
5	2	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI	6.000.000,00
5	2	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah	114.134.985,00
5	2	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional	310.875.000,00
5	2	2	14	04	Belanja pakaian olah raga	226.095.000,00
5	2	2	14	06	Belanja Pakaian Kafilah	26.575.000,00
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	30.483.429.060,00
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.621.614.600,00
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	22.861.814.460,00
5	2	2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.474.076.600,00
5	2	2	17	01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.075.047.600,00
5	2	2	17	02	Belanja sosialisasi	502.554.000,00
5	2	2	17	04	Belanja bimbingan teknis	299.500.000,00
5	2	2	17	05	Belanja Kepesertaan	2.596.975.000,00
5	2	2	18		Belanja Perjalanan Pindah Tugas	500.000,00
5	2	2	18	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah	500.000,00
5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan	15.451.485.631,00
5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.335.000,00
5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.608.838.400,00
5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Irigasi	2.966.037.479,00
5	2	2	20	07	Belanja pemeliharaan Jaringan	481.000.000,00
5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Sarana Air Bersih / Sanitasi	1.136.474.700,00
5	2	2	20	10	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dicara	40.000.000,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1				2	3
5	2	3	14	07 Belanja modal pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	18.115.000,00
5	2	3	15	Belanja Modal Pengadaan Pehias Ruangan Rumah Tangga	300.000,00
5	2	3	15	02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja	300.000,00
5	2	3	16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	217.300.000,00
5	2	3	16	01 Belanja modal pengadaan kamera	37.500.000,00
5	2	3	16	03 Belanja modal pengadaan proyektor	39.300.000,00
5	2	3	16	05 Belanja modal pengadaan sound system	140.500.000,00
5	2	3	17	Belanja Modal Pengadaan Ala-alat Komunikasi	716.839.836,00
5	2	3	17	08 Belanja modal pengadaan alat komunikasi lainnya	645.069.836,00
5	2	3	17	09 Belanja modal pengadaan televisi	50.670.000,00
5	2	3	17	10 Belanja Sound System	21.100.000,00
5	2	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	5.000.000,00
5	2	3	18	04 Belanja modal pengadaan alat GPS	5.000.000,00
5	2	3	19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	45.068.726.000,00
5	2	3	19	01 Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran umum	45.068.726.000,00
5	2	3	20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	14.080.500,00
5	2	3	20	06 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan	14.080.500,00
5	2	3	21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	44.615.512.518,00
5	2	3	21	01 Belanja modal pengadaan konstruksi jalan	31.201.154.938,00
5	2	3	21	08 Belanja modal Pembangunan jalan setapak	4.813.222.100,00
5	2	3	21	09 Belanja modal Rehabilitasi / pemeliharaan jalan (Rutin / Periodik)	5.756.494.350,00
5	2	3	21	10 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	899.000.000,00
5	2	3	21	11 Belanja Modal Perintisan / Pemb. Jalan	1.108.940.000,00
5	2	3	21	13 Belanja Modal Pembangunan Bangunan Perlengkap Jalan	836.701.130,00
5	2	3	23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	72.961.974.700,00
5	2	3	23	03 Belanja modal pengadaan konstruksi kanal permukaan	5.974.060.000,00
5	2	3	23	05 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	35.290.404.900,00
5	2	3	23	06 Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	12.177.251.900,00
5	2	3	23	09 Belanja Modal Sumur	4.839.727.900,00
5	2	3	23	10 Belanja Modal Tanggul / Penahan Longsor	9.367.290.000,00
5	2	3	23	1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai	633.710.000,00
5	2	3	23	12 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	339.530.000,00
5	2	3	23	13 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.340.000.000,00
5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	778.634.000,00
5	2	3	24	02 Belanja modal pengadaan lampu hias taman	35.000.000,00
5	2	3	24	05 Belanja Modal Pengadaan Taman	593.684.000,00
5	2	3	24	08 Belanja Modal Pemasangan LPJU Hemat Energi	149.950.000,00
5	2	3	25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.684.895.000,00
5	2	3	25	01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik	1.684.895.000,00
5	2	3	26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan	51.642.103.540,00
5	2	3	26	01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	14.738.655.000,00
5	2	3	26	02 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan	95.770.000,00
5	2	3	26	03 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	107.200.000,00
5	2	3	26	04 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	292.980.000,00
5	2	3	26	08 Belanja modal Pengadaan/Peningkatan Pasar	7.161.088.882,00

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp.)	
1				2	3	
5	2	3	26	10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sekolah	13.372.383.058,00
5	2	3	26	11	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Lainnya	3.736.885.500,00
5	2	3	26	12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pelayanan Umum	74.940.000,00
5	2	3	26	18	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pemilahan sampah	2.897.650.000,00
5	2	3	26	19	Belanja Modal Pengadaan Pagar	2.999.991.100,00
5	2	3	26	20	Belanja Modal Pengadaan Taman	500.000.000,00
5	2	3	26	22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	320.310.000,00
5	2	3	27		Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	264.780.000,00
5	2	3	27	27	Belanja bahan bacaan	164.780.000,00
5	2	3	27	31	Belanja Modal Pengadaan Buku / Kepustakaan SMP	100.000.000,00
5	2	3	28		Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	18.000.000,00
5	2	3	28	07	Belanja modal Pengadaan alat kesenian	18.000.000,00
5	2	3	31		Belanja Modal Dana BOS	11.920.000,00
5	2	3	31	04	Belanja modal peralatan dan perlengkapan rumah tangga	11.920.000,00
					SURPLUS/(DEFISIT)	(71.540.031.631,00)
6					PEMBIAYAAN DAERAH	
6	1				PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.540.031.631,00
6	1	1			SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	71.540.031.631,00
6	1	1	07		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71.540.031.631,00
6	1	1	07	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	71.540.031.631,00
					PEMBIAYAAN NETTO	71.540.031.631,00
					SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-



BUPATI JENEPONTO,
IKSAN ISKANDAR